



## Capacity Building Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Karawang

Arsiyana Widy Pratama<sup>1</sup>, Rachmat Hidayat<sup>2</sup>, Ani Nurdiani Azizah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

<sup>2,3</sup>Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

Received: 3 Juni 2022  
Revised: 6 Juni 2022  
Accepted: 10 Juni 2022

### Abstract

*This study aims to find out and examine the Capacity Building of the Social Service in Reducing Extreme Poverty in Karawang Regency by using the Gandara theory in Bambang Irawan (Organizational Capacity and Public Service, 2016) in which there are dimensions of capacity building covering five dimensions, namely (1) Preparation, (2) Analysis, (3) Planning, (4) Implementation, (5) Evaluation. This study used descriptive qualitative method. The data collection technique was carried out through triangulation which included interviews, observations and documentation studies, then the data that had been obtained were analyzed through three stages, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of research and discussion show that it is still not optimal in all dimensions of the Social Service Capacity Building variable in reducing extreme poverty in Karawang Regency where preparations are still immature so they are not able to take advantage of opportunities from natural and industrial potential, the analysis is not sharp enough to cause poor planning. not very good, which causes the percentage of the extreme poor in Karawang to be higher than the average for the province of West Java. Implementation is carried out through several assistance programs not towards community empowerment so that the Social Service is required to be able to carry out a large-scale evaluation in order to optimize the prevention of extreme poverty in Karawang Regency*

**Keywords:** *extreme poverty, Dinsos Karawang, Capacity Building*

(\*) Corresponding Author: [igodhimas44@gmail.com](mailto:igodhimas44@gmail.com), [agustian.suseno@ft.unsika.ac.id](mailto:agustian.suseno@ft.unsika.ac.id), [dimasnurwinatarinaldi@gmail.com](mailto:dimasnurwinatarinaldi@gmail.com)

**How to Cite:** Pratama, A., Hidayat, R., & Azizah, A. (2022). Capacity Building Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(9), 125-133. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6634313>

## PENDAHULUAN

*United Nations Development Programme* (UNDP) selaku badan dunia yang menangani kemiskinan dalam bukunya *Human Development report 2016 : Human Development for Everyone* menyatakan bahwa arus globalisasi dan pesatnya perkembangan dalam berbagai bidang ternyata tidak sejalan dengan penurunan jumlah masyarakat miskin di dunia. Pertumbuhan populasi yang meningkat tajam



sebesar 2 miliar dari mulanya 5.3 miliar jiwa pada tahun 1990 menjadi 7.3 miliar jiwa pada tahun 2015 dimana tidak lebih dari 1 miliar orang yang berhasil lolos dari kemiskinan, semakin memperburuk kondisi perekonomian negara dunia (Jahan, 2017, hal. 3)

Fenomena kemiskinan telah menjadi perhatian utama masyarakat dunia, terutama dinegara-negara berkembang yang umumnya berada diwilayah Asia maupun Afrika. Laporan dari Bank Pembangunan Asia atau *Asian Development Bank* (ADB) dalam (Jayani, 2011) mendeskripsikan bahwa pertumbuhan masyarakat miskin di Asia tidak hanya berkutat pada kemiskinan biasa melainkan juga kemiskinan ekstrem, dimana pada tahun 2020 terdapat 104 juta penduduk Asia yang dikategorikan sebagai masyarakat ekstrem dengan penghasilan dibawah USD 1,9 PPP (Pendapatan Perkapita) atau jika dirupiahkan hanya sebatas 11 ribu rupiah perhari atau lebih sedikit jika dibandingkan dengan kemiskinan biasa yang berpenghasilan 3,2 USD perhari.

Menurut Tjondronegoro dalalam bukunya *Indomiskinesia* (1996, hal. 2) masyarakat yang tergolong dalam kemiskinan ekstrem sangat sulit untuk dapat bertahan hidup dengan layak karena untuk sulitnya memenuhi kebutuhan sandang dan pangan serta kebutuhan primer lainnya. Lebih lanjut kemiskinan menurut Gunawan Sumodiningrat dalam bukunya *Kemiskinan: Teori, kebijakan dan Fakta* (1999, hal. 26) menyebutkan jika permasalahan yang ditimbulkan oleh karena adanya kemiskinan tidak hanya berkutat pada permasalahan individu manusia yang dianggap miskin, melainkan dapat menjaral kebeberapa sektor lain seperti sosial, budaya dan politik.

Begitu kompleksnya permasalahan kemiskinan negara-negara didunia bersepakat untuk melakukan penanggulangan kemiskinan terutama pada kemiskinan yang sudah ekstrem, maka pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) poin tentang *No Poverty* atau tanpa kemiskinan ditempatkan pada poin awal dari 17 agenda yang telah ditetapkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa yang harus segera tertanggulangi dengan baik dan cepat (Purnomo & Agustiyara, 2020).

Jumlah kemiskinan ekstrem yang ada di Indonesia menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dalam (Setyowati, 2022) menyatakan jika ditahun 2021 terdapat 10,67 juta jiwa masyarakat Indonesia yang masuk kedalam zona kemiskinan ekstrem. Angka tersebut jika dipresentasikan, maka sama halnya dengan 4 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Meskipun presentase kemiskinan ekstrem di Idonesia terbilang cukup dinamis, namun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yakni pada tahun 2019 sampai 2021 terjadi kenaikan presentase penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Karawang

Kenaikan presentase masyarakat miskin ekstrem di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal salahsatunya adalah pandemi Covid-19, sehingga presentase ini dapat diproyeksikan terus mengalami peningkatan mengingat masih belum berakhirnya wabah pandemi Covid19 di Indonesia. Sebaran mengenai kemiskinan ekstrem terjadi paling banyak di wilayah perdesaan yang notabene masih mengandalkan potensi alam berupa bertani atau nelayan, namun tidak sedikit pula terjadi di daerah-daerah yang terkenal memiliki potensi disektor industri, seperti yang terjadi di Kabupaten Karawang.

Kabupaten Karawang pada tahun 2021 telah ditetapkan sebagai salahsatu daerah ekstrem kemiskinan di Indonesia oleh pemerintah Pusat yang diwakili oleh Wakil Presiden ketika kunjungan kerjanya di Provinsi Jawa Barat, rata-rata kemiskinan di Karawang berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (2022) dalam kurun waktu tiga tahun terakhir selalu diatas rata-rata masyarakat miskin provinsi Jawa Barat, dimana pada tahun 2021 rata-rata masyarakat miskin di Karawang adalah 8,95 persen sedangkan rata-rata kemiskinan di Provinsi Jawa Barat adalah 8,4 persen, adapun untuk kemiskinan ekstrem di Kabupaten Karawang ialah 4,51 persen atau 108.760 jiwa yang tersebar di 25 desa di 5 kecamatan.

Penetapan Kabupaten Karawang sebagai salah satu daerah miskin ekstrem di Indonesia, tentu berbanding terbalik dengan harapan Karawang yang termuat dalam *branding city* Karawang, yakni Karawang Kota Industri. Perindustrian sendiri cenderung mengarahkan roda perekonomian suatu daerah untuk terus bergerak lebih maju, menurut Direktur Jenderal Pengembangan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian dalam (Nurmayanti, 2019) menyebutkan bahwa Kabupaten Karawang adalah pusat kantong perekonomian nasional karena banyaknya investor yang menanamkan modal di Kabupaten Karawang.

Berdasarkan catatan yang termuat pada Rencana Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2019 Kabupaten Karawang memiliki 12 kawasan elit perindustrian dengan luas keseluruhan mencapai 13.756.358 hektar serta 1762 perusahaan sehingga menempatkan Kabupaten Karawang sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, Upah Minimum Kabupaten.Kota di Karawang tertinggi kedua di Indonesia setelah Kota Bekasi dengan besaran mencapai 4,7 juta rupiah yang jika dibandingkan dengan penghasilan kemiskinan ekstrem tentu sangat berbeda jauh.

Meskipun terdapat banyak perusahaan angka tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Karawang pada tahun 2021 mengalami pelonjakan sebesar 0,31 persen dari tahun sebelumnya. Tingkat penangguran banyak terjadi di wilayah pedesaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai zona ekstrem kemiskinan, dimana terdapat lebih dari setengah dari jumlah keseluruhan tingkat pengangguran terbuka di Karawang berasal dari 25 desa zona ekstrem kemiskinan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, 2021).

Selain potensi industri Karawang juga dikenal dengan kota Lumbung Padi, dimana menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karawang dalam (Raka, 2020) Karawang merupakan daerah penghasil padi terbesar nomor dua di seluruh Indonesia atau nomor satu di Provinsi Jawa Barat mengalahkan Kabupaten Cirebon dan juga Cianjur dengan hasil panen memncapai 1,2 juta ton gabah kering yang jika dijadikan beras mencapai muatan 671 ribu ton. Sektor pertanian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Karawang tahun 2020 ditopang oleh luasnya wilayah persawahan dan tanah subur yang mencapai 95 ribu hektar.

Potensi mengenai persawahan sejatinya menyebar hampir di beberapa kecamatan yang tercatat sebagai wialayah kemiskinan ekstrem, seperti di Kecamatan Kutatandingan dan Kecamatan Pedes. Selain itu, Kabupaten Karawang juga mempunyai sektor lain yang dapat dioptimalkan untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem, salahsatunya adalah potensi bahari di Laut Jawa yang berdekatan dengan Kecamatan Cilamaya.

Adanya jarak antara harapan yang muncul oleh karena tingginya potensi terutama disektor industri dan pertanian dengan kondisi lapangan nyata yang saat ini terjadi di Karawang yakni ditetapkan sebagai zona ekstrem kemiskinan oleh pemerintah pusat menjadikan Pemerintah untuk bisa melakukan beberapa upaya guna menanggulangi ketidaksesuaian tersebut. Terlebih Pemerintah Daerah Karawang adalah instansi yang bertanggungjawab atas keberadaan kemiskinan ekstrem sesuai dengan mandatris yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa penanggulangan atau penanganan kemiskinan merupakan upaya terpadu dan berkelanjutan yang harus difasilitasi, diberdayakan dan didampingi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Pada ruang lingkup organisasi pemerintah Daerah Karawang lebih spesifik untuk melakukan penanganan terhadap kemiskinan ekstrem adalah Dinas Sosial Kabupaten Karawang, dimana hal ini sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Karawang yang tertera dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Lanjut dan Rujukan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Karawang Pasal 1 dan 4 yang menyatakan bahwa Dinas Sosial dituntut untuk mampu melakukan strategi atas permasalahan sosial di Kabupaten Karawang, seperti Kemiskinan ekstrem.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka Dinas Sosial Kabupaten Karawang dituntut untuk mampu melahirkan masyarakat yang unggul di 25 (dua puluh lima) Desa yang terdampak ekstrem kemiskinan, melalui pengembangan skil serta kemampuan lainnya yang dapat menghantarkan 108.760 jiwa keluar dari kemiskinan ekstrem atau kenaikan taraf kehidupan. Konsep demikian dalam kajian ilmu pemerintahan sering disebut dengan *Capacity Building*.

Atas dasar permasalahan yang telah terurai pada latar belakang ini, penulis memiliki ketertarikan atau minat untuk mengangkat permasalahan ini sebagai bahan penelitian pada tugas akhir kuliah pada program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang dengan judul "*Cappacity Building* Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim Di Kabupaten Karawang".

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Definisi mengenai *Capacity Building* dari era klasik hingga kontemporer sekarang diartikan melalui beberapa perbedaan oleh para ahli. Alasan ini dilatar belakangi karena *Capacity Building* merupakan konsep yang universal dan memiliki dimensi yang beragam. Grindle dalam Yeremias T Keban (2015) memberikan definisi mengenai capacity building sebagai strategi yang ditujukan guna meningkatkan efisiensi, efektivitas serta responsivitas dari kinerja pemerintahan dengan memusatkan perhatian kepada pengembangan dimensi, sumberdaya manusia, penguatan organisasi dan reformasi kelembagaan maupun lingkungan

*Capacity Building* merupakan serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dari kinerja individu, kelompok, atau organisasi guna mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Gandara dalam Bambang Irawan (Kapasitas Organisasi dan Pelayanan Publik, 2016) dimensi *capacity building* meliputi lima dimensi yaitu (1) Persiapan, (2) Analisis, (3) Perencanaan, (4) Implementasi, (5) Evaluasi.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif yang menurut Sugiyono (2017) yakni sebuah metode yang digunakan oleh peneliti untuk penelitian yang dilakukan dalam kondisi alamiah dan didasari oleh filsafat *postpositivisme*. Dalam penelitian model ini peneliti adalah kunci yang akan menjabarkan hasil penelitian kedalam narasi atau gambar-gambar

Teknik pengambilan data dilalui melalui model triangulasi yang merupakan gabungan dari wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Adapun wawancara yang digunakan adalah tidak berstruktur sehingga tidak berpaku pada pedoman wawancara yang ditujukan kepada elemen-elemen terkait, observasi dilakukan di wilayah kabupaten Karawang dengan model *Non-Participant*. Sementara studi dokumentasi diperoleh melalui dua cara yakni teknik *offline* seperti buku dan *online* seperti *website*.

Setelah dilakukan pengambilan data, kemudian peneliti melakukan analisis terhadap data yang didapatkan sesuai dengan Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2017) yang diproses melalui tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Persiapan**

Pada dimensi ini terdapat 5 indikator kerja yaitu : (1). Identifikasi kebutuhan untuk pengembangan kapasitas, langkah kerja ini memiliki kegiatan utama yaitu mengenali alasan-alasan dan kebutuhan nyata untuk mengembangkan kapasitas. (2). Menentukan tujuan-tujuan. Langkah kerja ini memiliki kegiatan utama yaitu melakukan konsultasi dengan stakeholder utama untuk mengidentifikasi isu utama pengembangan kapasitas (3). Memberikan tanggung jawab. Langkah kerja ini memiliki kegiatan utama yaitu menetapkan penanggungjawab kegiatan pengembangan kapasitas, misal membentuk tim teknis atau satuan kerja (4). Merancang proses pengembangan kapasitas. Langkah kerja ini memiliki kegiatan utama yaitu menentukan metodologi pemetaan sesuai permasalahan yang muncul dan membuat penjadwalan kegiatan tentang proses pemetaan dan tahapan perumusan berikutnya tentang rencana tindak pengembangan kapasitas. (5). Pengalokasian sumber daya. Kegiatan utamanya adalah mengidentifikasi pendanaan kegiatan proses pengembangan kapasitas dan mengalokasikan sumber daya dengan membuat formulasi kebutuhan sumber daya sesuai anggaran yang dibutuhkan dan dapat disetujui oleh pihak berwenang

Persiapan Dinas Sosial dalam melakukan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Karawang dirasa belum optimal hal ini dikarenakan tidak adanya anggaran khusus yang secara spesifik dialokasikan untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Karawang, sehingga menyebabkan beberapa anggaran di program lain mengalami pemotongan ditengah jalan seperti program Karawang Cerdas.

### **Analisis**

Pada dimensi ini terdapat 5 variabel indikator kinerja yang meliputi, (1). Mengidentifikasi permasalahan dalam hal ini kegiatan utamanya berupa melakukan

pemeriksaan terhadap masalah guna penyelidikan lebih lanjut. (2). Analisis terhadap proses dalam hal ini kegiatan utamanya berupa menghubungkan permasalahan untuk pemetaan kapasitas dengan proses kinerja system, organisasi dan individu. (3). Analisis organisasi dalam hal ini kegiatan utamanya berupa memilih organisasi untuk diselidiki lebih dalam (pemetaan organisasional). (4). Memetakan gap dalam kapasitas dalam hal ini kegiatan utamanya adalah berupa memetakan jurang pemisah antara kapasitas ideal dengan kenyataannya. (5). Menyimpulkan kebutuhan-kebutuhan pengembangan kapasitas yang mendesak dalam hal ini kegiatan utamanya adalah berupa menyimpulkan temuan-temuan dan mengumpulkan usulan-usulan untuk rencana tindak pengembangan kapasitas.

Melalui penelitian yang penulis lakukan Dinas Sosial telah melakukan pengamatan mengenai fenomena kemiskinan ekstrem namun dalam pelaksanaannya hasil pengamatan tersebut tidak dianalisis sehingga tidak menghasilkan rencana matang untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem di Rencana Strategi Dinas Sosial Kabupaten Karawang.

Oleh karena tidak adanya unsur atau poin mengenai kemiskinan ekstrem menyebabkan Dinas Sosial belum mampu memetakan secara pasti tentang kebutuhan yang diperlukan dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Karawang. Selanjutnya temuan-temuan yang tidak dianalisis ini hanya menampilkan sisi kesimpulan sementara dan relatif bukan pada poin dimana menghasilkan penarikan kesimpulan akhir dengan kebenaran yang bersifat universal.

### **Perencanaan**

Pada dimensi ini terdapat 3 indikator kerja yakni, (1). Perencanaan tahunan, kegiatan utamanya adalah merumuskan draf rencana tindak pengembangan kapasitas. (2). Membuat rencana jangka menengah, kegiatan utamanya berupa pertemuan-pertemuan konsultatif. (3). Menyusun skala prioritas, kegiatan utamanya berupa menetapkan skala prioritas pengembangan kapasitas dan tahapan-tahapan implementasinya.

Rencana Dinas Sosial terhadap pengembangan kapasitas masyarakat miskin ekstrem di Kabupaten Karawang hanya berorientasi pada ranah rencana prioritas dimana rencana tahunan dan jangka menengah belum dapat penulis temukan baik di dalam rencana strategi Dinas Sosial Karawang pada masa bakti periode ini maupun studi kepustakaan lainnya.

Minimnya perencanaan membuat kemiskinan ekstrem Karawang mengalami lonjakan terutama ketika di masa pandemi Covid19 dimana masyarakat banyak mengalami kemunduran ekonomi karena adanya beberapa hal seperti pemecatan dari tempat kerja sampai pada usaha yang mengalami gulung tikar

### **Implementasi**

Pada dimensi ini terdapat 5 indikator yang meliputi: (1). Pemrograman, kegiatan utamanya berupa mengalokasikan sumber daya yang dimiliki saat ini. (2). Perencanaan proyek pengembangan kapasitas, kegiatan utamanya berupa merumuskan kebijakan implementasi pengembangan kapasitas. (3). Penyeleksian penyedia jasa layanan pengembangan kapasitas, kegiatan utamanya berupa mengidentifikasi layanan dan produk luar terkait kebutuhan implementasi pengembangan kapasitas yang akan dikerjakan. (4). Implementasi proyek, kegiatan utamanya berupa implementasi program tahunan pengembangan kapasitas sesuai

sumber daya yang ada dan jadwal yang tersedia. (5). Monitoring proses, kegiatan utamanya berupa melakukan monitoring terhadap aktifitas-aktifitas pengembangan kapasitas

Pada ruang lingkup organisasi pemerintah Daerah Karawang lebih spesifik untuk melakukan penanganan terhadap kemiskinan ekstrem adalah Dinas Sosial Kabupaten Karawang, dimana hal ini sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Karawang yang tertera dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Lanjut dan Rujukan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Karawang Pasal 1 dan 4 yang menyatakan bahwa Dinas Sosial dituntut untuk mampu melakukan strategi atas permasalahan sosial di Kabupaten Karawang, seperti Kemiskinan ekstrem

Dalam menjalankan mandatris penanggulangan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Karawang melakukan beberapa program untuk melakukan penanggulangan kemiskinan ekstrem diantaranya dengan cara bekerjasama antar lembaga pemerintahan internal Karawang yang kemudian menyalangkan subsidi di beberapa program atau kebijakan untuk dialokasikan sebagai bentuk mengurangi penderitaan masyarakat ekstrem di kabupaten Karawang seperti pemotongan anggaran Karawang Cerdas yang sejatinya diperuntukan untuk beasiswa kaum terpelajar di Karawang agar meningkatkan Indeks Kualitas Manusia di Kabupaten Karawang namun pemotongan ini tidak terpublikasi dengan baik kepada seluruh masyarakat Karawang.

Langkah ini sejatinya berpotensi pada dua hal buruk yakni memudarnya tingkat kepercayaan masyarakat dimana hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa demonstrasi yang dilakukan oleh beberapa organisasi baik mahasiswa maupun masyarakat yang mennanyakan tentang pemotongan beasiswa Karawang Cerdas karena mereka tidak mengetahui jika Beasiswa Karawang Cerdas dipoting untuk menanggulangi kemsikinan ekstrem yang terjadi di Karawang. Kedua adalah bantuan yang diberikan hanya berupa kebijakaan sesaat sehingga masyarakat tidak mampu mengoptimalkan bantuan tersebut secara baik dalam mengeluarkan mereka dari lingkaran kemiskinan ekstrem

### **Evaluasi**

Pada dimensi ini terdapat 2 variabel indikator kerja yang meliputi : (1). Evaluasi dampak, kegiatan utamanya berupa mengevaluasi pencapaian pengembangan kapasitas, seperti peningkatan kinerja. (2). Merencanakan ulang rencana tindak pengembangan kapasitas, kegiatan utamanya adalah melakukan analisa terhadap temuan monitoring proses dan evaluasi dampak dalam konteks kebutuhan perencanaan ulang pengembangan kapasitas

Pada dimensi terakhir ini Dinas Sosial Kabupaten Karawang dirasa perlu untuk melakukan evaluasi dan merencanakan ulang secara besar-besaran garis perencanaan sampai mendapati hasil yang mampu mengoptimalkan perannya dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem. Karawang yang sejatinya wilayah dengan potensi tinggi baik dari alam maupun industri perlu diadakan kebijakan yang bersifat sosial. Selanjutnya evaluasi ini juga diharapkan mengarah pada tahapan keseriusan dalam mengaktualisasi kebijakaan bukan menjadikan program sebagai simbol sesaat, dimana kebijakan berupa pelatihan lebih baik karena dapat meningkatkan kualitas masyrakat ekstrem Karawang dibanding bantuan yang sifatnya sesaat seperti uang atau sembako.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang *Capacity Building* Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Karawang, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut

1. Dimensi persiapan menunjukkan hasil yang belum optimal karena belum dimaksimalkannya peluang dari sektor industri dan alam
2. Dimensi analisis menunjukkan hasil yang belum optimal oleh karena belum adanya analisa yang membuahkan hasil secara spesifik mengenai latar belakang sampai tujuan daripada kemiskinan ekstrem di Karawang
3. Dimensi perencanaan menunjukkan hasil yang belum optimal oleh karena tidak ditemukannya rencana panjang dan tahunan dalam rencana strategi Dinas Sosial Kabupaten Karawang dalam satu periode
4. Dimensi implementasi menunjukkan hasil yang belum optimal oleh karena bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang terhadap masyarakat miskin hanya berorientasi pada simbolitas sesaat bukan pemberdayaan yang prospek panjang
5. Dimensi evaluasi menunjukkan adanya tuntutan yang harus mampu mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Karawang oleh Dinas Sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang. (2021, Mei 5). Berita Resmi Badan Pusat Statistik : Keadaan Ketenagakerjaan Febuari 2021. Karawang, Jawa Barat, Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2022, Januari 3). *Beranda » Kemiskinan » Persentase Penduduk Miskin*. Retrieved from Persentase Penduduk Miskin (Persen), 2019-2021: <https://jabar.bps.go.id/indicator/23/51/1/persentase-penduduk-miskin.html>
- Brown, L. (2001). *Measuring Capacity Building*. Chapel Hill: Unversity of North Carolina.
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Irawan, B. (2016). *Kapasitas Organisasi dan Pelayanan Publik*. Jakarta: Publica Press.
- Jahan, S. (2017). *Human Development report 2016 : Human Development for Everyone* . New York: UNDP.
- Jayani, D. H. (2011, November 23). *Jumlah Kemiskinan Ekstrem Negara Berkembang Asia (1990-2017)*. Retrieved from Asian Development Bank: <file:///C:/Users/MY%20PC/Downloads/kemiskinan-ekstrem-di-negara-berkembang-asia-semakin-berkurang.pdf>
- Keban, Y. T. (2015). Capacity Building Sebagai Prakondisi dan Langkah Strategis bagi Perwujudan Otonomi Daerah di Indonesia. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*.
- Keban, Y. T. (2015). Capacity Building Sebagai Prakondisi dan Langkah Strategis bagi Perwujudan Otonomi Daerah di Indonesia. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*.

- Kementerian PPN/Bappenas. (2021). *Strategi dan Kebijakan Mendorong Penurunan Kemiskinan Ekstrem*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Kencana, S. I. (2018). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Nurmayanti. (2019, Desember 17). *Liputan6>Home>News>Ekonomi*. Retrieved from Kota Industri Karawang Bisa Jadi Kantong Ekonomi Baru: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3187844/kota-industri-karawang-bisa-jadi-kantong-ekonomi-baru>
- Purnomo, E. P., & Agustiyara. (2020). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Sosial Humaniora*, 6 (2), 64-74.
- Poelje, G. A. (1953). *Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan, cetakan kedua*. Jakarta: N.V Soeroengan.
- Raka. (2020, Desember 23). *Radarkarawang>Metropolis*. Retrieved from Karawang Penghasil Beras Terbesar Kedua Nasional: <https://radarkarawang.id/metropolis/karawang-penghasil-beras-terbesar-kedua-nasional/>
- Setyowati, D. (2022, Febuari 17). *Katadata>Berita>Nasional*. Diambil kembali dari Pemerintah Target Hanya 2,5 Juta Penduduk Miskin Ekstrem Tahun Depan: <https://katadata.co.id/desysetyowati/berita/620cfcb7493fa/pemerintah-target-hanya-2-5-juta-penduduk-miskin-ekstrem-tahun-depan#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20ekstrem%20di,juta%20penduduk%20per%20tahun%202021.>
- Soeprapto, R. (2006). Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Vol. 1 No. 1*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat, G. (1999). *Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan*. Jakarta: Impac.
- Susanto, A. (2016). *Manajemen Peningkatan Kinerja*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Bupati Karawang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Lanjut dan Rujukan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Karawang
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (2011). *Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah*. Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (2021). *Frequently Asked Question (FAQ) Modul 3 (Kolaborasi/Kerjasama Sektor Pemerintah dan Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem)*. Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (2021). *Model Konvergensi Kemiskinan Ekstrem di Daerah*. Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.
- Tjondronegoro. (1996). *Indonemiskinesia*. Jakarta: Asian Development Bank.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Fakir Miskin